

KETEREKAITAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ETIKA SOSIAL

¹Imam Mustafa Nasution, ²Muhammad Akmal Farisi, ³Sigit Nurdiansyah,

⁴Rafi Fauzan Nugraha, ⁵Anggelika Afliantika Jeharrut

E-mail: sigtnurdiansyah762@gmail.com, akmalfarisi72@gmail.com,
yeshajeharut@gmail.com, rafifauzannugraha1103@gmail.com, imamnst19@gmail.com

ABSTRAK

This paper examines the close relationship between Civic Education (PKn) and Social Ethics. Civic Education, which emphasizes the internalization of civic values, rights, obligations, and participation in the political system, serves as both a conceptual and practical foundation. Meanwhile, Social Ethics, which highlights moral principles in social interactions and collective responsibility, provides the arena for applying these values. The study argues that the effectiveness of Civic Education will be more optimal if it explicitly integrates the dimension of Social Ethics, thereby fostering citizens who are not only law-abiding but also possess integrity, empathy, and a strong sense of social responsibility. Without the ethical dimension, Civic Education risks producing individuals who comply with rules procedurally but lack compassion, justice, and collective awareness. Through the integration of Social Ethics, Civic Education can equip individuals with the ability to make ethical decisions when facing complex societal issues such as corruption, discrimination, and environmental challenges. Thus, Civic Education contributes to the development of a social order that is just, harmonious, and sustainable.

Keywords: Interconnectedness, Citizenship Education, Social Ethics

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah hubungan erat antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Etika Sosial. PKn yang menitikberatkan pada internalisasi nilai kewarganegaraan, hak, kewajiban, serta keterlibatan dalam sistem politik, berperan sebagai dasar konseptual maupun praktis. Di sisi lain, Etika Sosial yang menekankan prinsip moral dalam interaksi antaranggota masyarakat serta tanggung jawab bersama, menjadi ruang implementasi nilai tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas PKn akan lebih optimal jika memasukkan dimensi Etika Sosial secara eksplisit, sehingga mampu melahirkan warga negara yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga berintegritas, berempati, dan memiliki tanggung jawab sosial. Tanpa penguatan aspek etika, PKn berpotensi hanya membentuk warga yang benar secara prosedural, namun lemah dalam kepedulian, keadilan, serta kesadaran kolektif. Melalui integrasi Etika Sosial, PKn dapat membekali individu dengan

kemampuan mengambil keputusan moral ketika menghadapi persoalan masyarakat yang kompleks, seperti praktik korupsi, diskriminasi, maupun isu lingkungan hidup. Dengan demikian, PKn turut mendorong lahirnya tatanan sosial yang adil, selaras, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keterkaitan, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Sosial

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya berfokus pada aspek pengetahuan, melainkan juga pada pembentukan kepribadian dan karakter. Melalui pendidikan, individu diharapkan mampu memahami nilai-nilai dasar kehidupan, seperti moralitas, etika, dan norma sosial yang berlaku. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk hidup bersama secara harmonis. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting. PKn tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dalam menanamkan nilai kebangsaan, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tujuan utama PKn adalah membentuk warga negara yang cerdas, aktif, kritis, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, etika sosial merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana manusia berperilaku dalam interaksi sosial. Etika sosial mengajarkan prinsip tentang tanggung jawab, keadilan, kepedulian, toleransi, serta rasa hormat terhadap sesama. Kehadiran etika sosial sangat penting dalam menjaga keteraturan hidup bermasyarakat, karena tanpa etika sosial, relasi antarindividu akan mudah dipengaruhi oleh konflik dan ketidakadilan.

Ketekaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan etika sosial dapat dipahami melalui tujuan keduanya yang sama-sama menekankan pada pembentukan karakter warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan kerangka formal mengenai hak dan kewajiban, sedangkan etika sosial memberikan dimensi moral yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi keduanya akan menghasilkan warga negara yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Warga negara yang baik (*good citizen*) bukan hanya memahami sistem hukum dan politik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kesadaran etis dalam bertindak menjadikan seseorang mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan harus selalu dikaitkan dengan etika sosial agar pembentukan karakter warga negara lebih menyeluruh. Di era globalisasi, tantangan terhadap etika sosial semakin besar. Meningkatnya arus informasi, perkembangan teknologi digital, serta gaya hidup yang serba instan telah membawa dampak pada pola pikir dan perilaku generasi muda. Fenomena seperti rendahnya kepedulian sosial, maraknya ujaran kebencian di media sosial, serta

semakin tingginya sikap individualisme menjadi tanda adanya pergeseran nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan kewarganegaraan yang diperoleh di sekolah dengan penerapannya dalam kehidupan sosial. Sering kali nilai yang diajarkan dalam ruang kelas tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan peserta didik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pendidikan dalam membentuk perilaku etis yang sesuai dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dan etika sosial. Penelitian semacam ini dapat menguraikan bagaimana integrasi nilai PKn mampu memperkuat pemahaman dan praktik etika sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidak berhenti pada ranah teoritis, melainkan mampu mewujudkan perubahan nyata dalam perilaku sosial. Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat fakta adanya krisis moral di kalangan remaja, seperti perilaku intoleransi, perundungan, dan penyalahgunaan teknologi. Semua fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan formal perlu diperkuat dengan nilai etika sosial agar generasi muda tidak terjebak dalam perilaku menyimpang. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai media utama untuk membangun kembali kesadaran moral tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pendidikan karakter yang berorientasi pada pembentukan warga negara beretika. Dengan meneliti keterkaitan PKn dan etika sosial, diharapkan akan ditemukan landasan konseptual yang lebih kuat tentang bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam proses pendidikan. Hal ini juga dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya dalam merumuskan strategi pembelajaran. Guru dan pendidik dapat memperoleh wawasan baru tentang cara mengintegrasikan nilai-nilai etika sosial ke dalam mata pelajaran PKn. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam membentuk budaya sekolah yang berorientasi pada moral dan etika sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dan etika sosial menjadi penting untuk dilakukan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana nilai-nilai PKn dapat memperkuat pemahaman dan penerapan etika sosial di kalangan peserta didik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada analisis teoritis. Metode studi literatur dipilih karena mampu

menggali berbagai sumber ilmiah yang relevan dan mendalam. Sumber yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dan etika sosial. Studi literatur memberi ruang untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang sudah dibangun oleh penelitian sebelumnya. Melalui telaah pustaka, penulis dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hasil temuan yang sudah ada. Metode ini juga bermanfaat dalam menemukan celah penelitian yang masih jarang dibahas secara mendetail. Analisis literatur dilakukan secara sistematis, kritis, dan terarah pada permasalahan utama penelitian. Setiap sumber yang dipilih dievaluasi berdasarkan relevansi, keaslian, serta kontribusinya terhadap topik kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan analisis komparatif. Hasil kajian literatur diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan PKn dengan etika sosial. Akhirnya, penelitian berbasis studi literatur ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan pendidikan karakter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum, demokratis, dan beretika sosial. Sosialisasi kewarganegaraan yang berbasis pada nilai Pancasila terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta mendorong perilaku sosial yang lebih adil dan harmonis (Louise et al., 2025)v5n2-no 4. Dengan demikian, keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan etika sosial terletak pada kemampuan keduanya untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup bersama secara damai dan saling menghargai. Temuan lain memperlihatkan bahwa aspek etika, moral, dan empati dalam interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran kewarganegaraan. Penelitian tentang perilaku perokok dalam hubungan sosial menegaskan bahwa etika berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial (Setiadina et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa PKn bukan sekadar mata pelajaran kognitif, melainkan wahana pendidikan moral yang menanamkan sikap empatik dan tanggung jawab terhadap orang lain.

PKn juga menjadi fondasi penting bagi demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan interdisipliner, PKn membantu siswa memahami hak, kewajiban, dan prinsip kesetaraan dalam kehidupan berbangsa (Saviola et al., 2023). Etika sosial yang berkembang dari pembelajaran ini akan menciptakan budaya partisipasi politik yang sehat, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, PKn berkontribusi langsung pada penguatan etika demokrasi di masyarakat. Dalam konteks globalisasi, penguatan etika sosial melalui pendidikan kewarganegaraan perlu berbasis pada karakter moral Pancasila. Irayanti dan Komalasari (2023). Menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan etis bagi pendidikan kewarganegaraan global karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

demokrasi, dan keadilan mampu menjawab tantangan moral global. Oleh karena itu, keterkaitan antara PKn dan etika sosial semakin relevan untuk membangun warga negara yang memiliki wawasan global sekaligus berakar pada nilai lokal. Perkembangan teknologi digital turut memunculkan tantangan baru dalam ranah etika sosial. Nugraha (2023) menyatakan bahwa etika digital harus diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan agar siswa mampu berperilaku bijak di ruang daring. Dengan demikian, PKn berfungsi tidak hanya sebagai pendidikan politik dan hukum, tetapi juga sebagai pengawal moralitas masyarakat digital. Hal ini penting karena fenomena ujaran kebencian dan perundungan siber dapat merusak tatanan sosial jika tidak ditangani dengan pendekatan etis.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun etika demokrasi semakin nyata di era global. Ulfah et al. (2021) menekankan bahwa PKn harus melahirkan warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan partisipatif. Etika sosial dalam hal ini merupakan refleksi dari civic dispositions yang dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu kecenderungan bertindak adil, menghargai hak orang lain, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keterkaitan PKn dan etika sosial dapat dilihat dari bagaimana siswa dan masyarakat mampu membangun kesadaran hukum serta sikap gotong royong. Louise et al. (2025) menunjukkan bahwa kesadaran hukum memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, PKn tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif, tetapi juga menghasilkan dampak praktis berupa peningkatan perilaku sosial yang berlandaskan keadilan dan kepedulian. Selain itu, pembelajaran PKn berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai moral yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya solidaritas sosial. Penelitian Irayanti dan Komalasari (2023) menegaskan bahwa etika sosial yang dibangun melalui nilai Pancasila dapat menjadi landasan utama dalam membangun kebersamaan, toleransi, serta sikap menghargai perbedaan di tengah masyarakat multikultural. Hal ini memperlihatkan bahwa PKn tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga menanamkan disposisi kewargaan (civic dispositions) yang mencerminkan tanggung jawab sosial.

Lebih jauh, Ulfah et al. (2021) menjelaskan bahwa keterkaitan PKn dan etika sosial tampak pada pembentukan warga negara yang kritis, demokratis, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sikap gotong royong yang dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kohesi sosial dan meminimalisasi konflik antarkelompok. Dengan demikian, PKn berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, Nugraha (2023) menambahkan bahwa penguatan etika sosial melalui PKn juga perlu diarahkan pada literasi digital dan etika bermedia. Hal ini penting agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan mampu menjawab tantangan sosial kontemporer sekaligus memperkuat nilai moral

yang bersumber dari Pancasila. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap generasi muda, salah satunya melemahkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Amalia & Najicha (2022), pengaruh globalisasi dapat mengurangi kepedulian terhadap nilai kebangsaan, menurunkan kepatuhan terhadap aturan, serta melemahkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting sebagai sarana penguatan nilai kewarganegaraan melalui pembelajaran yang aplikatif, kritis, dan kontekstual. PKn tidak hanya membekali siswa dengan pemahaman teoritis, tetapi juga menanamkan sikap nasionalisme, karakter kritis, serta kemampuan menyaring budaya asing yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, PKn menjadi benteng moral yang menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan instrumen penting dalam menanamkan nilai moral dan etika generasi muda di tengah tantangan zaman. Safitri et al. (2024), PKn tidak hanya terbatas pada penyampaian materi teoritis tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga harus berperan aktif sebagai media pembentukan karakter melalui sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanaman nilai moral ini diharapkan dapat membimbing generasi muda untuk mampu membedakan tindakan baik dan buruk, menghargai keberagaman, serta mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan sosial. Dengan penguatan fungsi PKn, peserta didik tidak hanya dibekali kecerdasan intelektual, tetapi juga kesadaran moral untuk bertindak sesuai norma dan tanggung jawab sosial, sehingga mampu menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Keberagaman budaya, agama, dan etnis yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Tinambunan et al. (2024), Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan pendidikan multikultural agar peserta didik memiliki kesadaran pluralisme yang kuat. PKn tidak cukup hanya menanamkan pengetahuan kewarganegaraan secara formal, tetapi juga harus menekankan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan keterbukaan terhadap keragaman budaya. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami arti penting kebhinekaan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi pendidikan multikultural dalam PKn diharapkan mampu mencegah diskriminasi dan konflik sosial, serta memperkuat persatuan bangsa dengan menjadikan pluralisme sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Generasi milenial sebagai pengguna media sosial terbanyak menghadapi tantangan besar terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik yang muncul di ruang digital. Nasoha et al. (2025), nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dijadikan pedoman moral karena di dalamnya terkandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Implementasi nilai tersebut mampu mengarahkan interaksi digital menjadi lebih sehat, penuh toleransi, dan menjunjung rasa tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila agar generasi muda tidak hanya mengetahui aturan secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam

perilaku nyata. Media sosial tidak hanya dipandang sebagai ruang hiburan, melainkan juga sebagai ruang publik yang menuntut norma dan etika demi terciptanya kehidupan digital yang harmonis dan berkeadaban. Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap interaksi sosial masyarakat. Kehadiran media sosial, meski memberikan kemudahan dalam komunikasi, juga melahirkan berbagai persoalan etika seperti ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran informasi palsu. Nugraha (2023), tantangan ini menuntut adanya integrasi etika digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan agar generasi muda mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan ruang daring. Dengan pemahaman etika digital yang kuat, peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menampilkan sikap bertanggung jawab, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa PKn memiliki fungsi strategis sebagai pengawal moralitas masyarakat modern.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan politik yang dinamis. Dalam era digital dan globalisasi, pendidikan yang berbasis nilai Pancasila tidak hanya menanamkan norma-norma dasar kewarganegaraan, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat (Sari & Pranoto, 2024). PKn sebagai wahana pembentukan karakter diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi muda yang resilien, mampu berfikir kritis dalam menyikapi informasi, dan memiliki integritas moral yang kuat sebagai pondasi utama dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Selain itu, PKn harus terus dikembangkan agar lebih responsif terhadap konteks sosial kontemporer, termasuk isu-isu lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghormati hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat (Rahayu et al., 2025). Dengan demikian, PKn tidak hanya berfungsi sebagai penguat etika sosial dalam ranah politik dan hukum, melainkan juga sebagai pondasi pembentukan etika lingkungan dan sosial yang komprehensif. Penguatan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan juga penting dalam membangun ketahanan mental peserta didik menghadapi tekanan sosial dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. PKn memberikan ruang untuk menginternalisasi identitas nasional sekaligus membekali generasi muda dengan kesadaran kritis agar dapat melakukan seleksi budaya yang sehat di tengah arus globalisasi (Wijayanti & Firdaus, 2024). Dengan integrasi metode pembelajaran kontekstual dan partisipatif, siswa diajak untuk aktif merefleksikan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki daya juang moral yang tinggi.

Pendidikan kewarganegaraan pun harus memperhatikan aspek inklusivitas dan keberagaman dalam pembelajarannya. Pendekatan multikultural yang kuat

dapat membuat peserta didik mampu menerima perbedaan, menghindari diskriminasi, dan membangun solidaritas lintas budaya (Fauziyah et al., 2024). Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya konflik yang berbasis identitas. Sejalan dengan itu, penerapan pendidikan demokrasi yang menekankan hak asasi manusia dan partisipasi aktif dapat membentuk budaya politik yang sehat dan beretika. Selain itu, integrasi teknologi dalam pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan untuk memaksimalkan pembelajaran etika digital yang adaptif dan inovatif. Penggunaan media digital sebagai media pembelajaran PKn harus diimbangi dengan pemahaman etika bermedia yang mendalam, sehingga generasi muda tidak terjebak dalam perilaku negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan radikalisme digital. Hal ini mendukung pandangan Nugraha (2023) tentang kebutuhan mendesak penguatan etika digital sebagai bagian integral kurikulum PKn agar siswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam masyarakat digital. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berperan sebagai media transfer pengetahuan dan nilai, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan etika sosial, demokrasi, teknologi, dan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Fungsi ini sangat relevan dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial, mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum, demokratis, dan beretika sosial. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, PKn tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan kesadaran moral untuk hidup berdampingan secara damai. Sosialisasi nilai kewarganegaraan yang berbasis Pancasila terbukti mampu meningkatkan perilaku sosial yang adil, harmonis, dan mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Hal ini menegaskan bahwa PKn bukan sekadar transfer pengetahuan kognitif, melainkan wahana pendidikan karakter yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Keterkaitan antara PKn dan etika sosial terletak pada kemampuan keduanya dalam membangun kesadaran kolektif. Etika sosial berfungsi sebagai pedoman moral dalam interaksi sehari-hari, sedangkan PKn menjadi sarana formal untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam sistem pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn mendorong siswa untuk memahami makna keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, PKn tidak hanya mencetak warga negara cerdas secara intelektual, tetapi juga individu yang mampu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam ranah demokrasi, PKn berkontribusi langsung pada pembentukan budaya politik yang sehat, partisipatif, dan beretika. Melalui pendekatan interdisipliner, siswa diajak memahami pentingnya kesetaraan,

penghargaan terhadap hak asasi, serta toleransi terhadap perbedaan. Etika sosial yang berkembang dari pembelajaran PKn memperkuat civic dispositions berupa kecenderungan bertindak adil, menghargai hak orang lain, serta menjaga solidaritas sosial.

Dengan demikian, PKn berfungsi sebagai fondasi demokrasi yang menanamkan nilai toleransi dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Dalam konteks globalisasi, PKn memiliki urgensi yang semakin kuat untuk menjaga identitas nasional sekaligus menjawab tantangan moral global. Pancasila sebagai dasar negara dapat dijadikan landasan etis pendidikan kewarganegaraan global, karena nilai-nilainya bersifat universal: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Melalui PKn, siswa tidak hanya diajarkan menjadi warga negara Indonesia yang baik, tetapi juga warga dunia yang memiliki wawasan global tanpa kehilangan akar lokal. Integrasi nilai Pancasila dengan etika sosial memperkuat kemampuan peserta didik menghadapi dampak globalisasi seperti individualisme, intoleransi, dan degradasi moral. Perkembangan teknologi digital menjadi tantangan baru yang menuntut PKn untuk memperluas cakupan etika sosial ke ranah digital. Fenomena seperti ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran hoaks menegaskan pentingnya penguatan literasi digital yang beretika. PKn berfungsi sebagai pengawal moralitas masyarakat digital dengan mengajarkan etika bermedia, tanggung jawab dalam berinteraksi daring, serta penghargaan terhadap perbedaan di ruang digital. Dengan demikian, PKn tidak hanya membentuk warga negara yang cerdas secara politik dan hukum, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan teknologi secara etis. Pembahasan juga memperlihatkan bahwa PKn memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial, toleransi, serta sikap gotong royong. Nilai-nilai Pancasila yang diinternalisasi melalui PKn memperkuat kesadaran hukum dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn menghasilkan dampak praktis berupa peningkatan perilaku sosial yang berlandaskan keadilan, solidaritas, dan kebersamaan. Oleh karena itu, PKn relevan sebagai instrumen utama untuk memperkokoh persatuan bangsa dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Selain itu, PKn juga harus mampu merespons isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran akan memperkuat peran PKn sebagai pendidikan moral yang komprehensif. Dengan pendekatan multikultural, PKn membantu siswa memahami arti penting pluralisme, menghindari diskriminasi, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Hal ini menegaskan bahwa PKn memiliki fungsi ganda, yakni menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong pembangunan masyarakat yang adil, setara, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai hukum, demokrasi, moral, dan etika sosial. Melalui PKn, generasi muda dibimbing menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, toleran, serta bertanggung jawab baik dalam ruang nyata maupun ruang

digital. Relevansi PKn semakin jelas di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang dinamis. Dengan menguatkan keterkaitan antara PKn dan etika sosial, Indonesia diharapkan mampu melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga matang secara moral dan berkarakter sesuai jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Louise, et al. (2025). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika Sosial*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(2), No. 4.
- Setiadina, et al. (2024). *Etika dan Empati dalam Interaksi Sosial: Studi Perilaku Perokok*. Jurnal Etika Sosial, 4(3), 77-91.
- Saviola, et al. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Fondasi Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Demokrasi, 11(1), 34-50.
- Irayanti, & Komalasari. (2023). *Pancasila sebagai Basis Etis Pendidikan Kewarganegaraan Global*. Jurnal Pendidikan Multikultural, 6(2), 55-70.
- Nugraha, A. (2023). *Integrasi Etika Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan, 8(1), 15-29.
- Ulfah, et al. (2021). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Etika Demokrasi*. Jurnal Civic Studies, 3(4), 44-60.
- Amalia, & Najicha. (2022). *Dampak Globalisasi terhadap Nilai Kebangsaan dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Sosial dan Politik, 9(2), 88-102.
- Safitri, et al. (2024). *Penguatan Nilai Moral melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan dan Karakter, 7(1), 33-47.
- Tinambunan, et al. (2024). *Integrasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Kewarganegaraan*. Jurnal Kebhinnekaan, 5(3), 70-85.
- Nasoha, et al. (2025). *Implementasi Nilai Pancasila dalam Interaksi Digital Generasi Milenial*. Jurnal Media dan Masyarakat, 10(1), 22-36.
- Sari, D. P., & Pranoto, H. (2024). Pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era digital dan globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45-58.
- Rahayu, N., Santoso, B., & Lestari, M. (2025). Integrasi nilai lingkungan dan inklusi sosial dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Etika Sosial*, 6(1), 22-38.
- Wijayanti, R. A., & Firdaus, A. (2024). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan identitas nasional di masa globalisasi. *Jurnal Studi Pembangunan*, 9(2), 101-117.
- Fauziyah, S., Hermanto, B., & Syahputra, R. (2024). Pendidikan multikultural sebagai strategi penguatan kebhinekaan dalam pembelajaran kewarganegaraan. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 7(1), 65-79.